

**KEWAJIBAN BANK KALBAR DALAM PEMBERIAN INFORMASI  
KEPADA DEBITUR SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN  
KREDIT TERKAIT IMBAL JASA PERTANGGUNGAN**

Oleh :

**H. SYAMSURRIZAL, SH  
NIM. A.2021141054**

**A B S T R A K**

Penelitian Tesis Ini Mengangkat Masalah “Analisis Kewajiban Bank Kalbar dalam Pemberian Informasi Kepada Debitur Sehubungan dengan Pemberian Kredit Terkait Imbal Jasa Pertanggungan”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Informasi mengenai Imbal Jasa yang merupakan kewajiban Pihak Bank Kalbar untuk disampaikan kepada debitur/konsumen tidak dilaksanakan dengan baik oleh Bank Kalbar karena imbal jasa terkait dengan perjanjian penjaminan yang pasti merupakan prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak Debitur/konsumen yang menimbulkan hak untuk memperoleh restitusi/refund premium karena penghentian kredit sebelum jangka waktu atau lebih dikenal dengan nama Topup apabila memperbaharui kembali fasilitas kreditnya, sehingga nasabah debitur/konsumen dirugikan, karena dilapangan tidak dilaksanakan oleh para petugas/kasi kredit.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan tidak sampainya informasi kepada debitur/konsumen terkait dengan imbal jasa antara lain: Sebelum Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh debitur hanya disuruh membaca setiap halaman perjanjian kredit, dalam Perjanjian Kredit antara debitur dengan Bank Kalbar, tidak ada diperjanjikan tentang pengembalian imbal jasa penjaminan/premi asuransi kredit apabila kredit dilunasi lebih cepat atau sebelum jatuh tempo jangka waktu kredit, tidak diinformasikan perusahaan asuransi yang menjadi penjamin serta resiko-resiko yang dicover, Perusahaan Penjamin/Lembaga Penjamin hanya bisa melakukan restitusi/ refund premium imbal hanya diketahui apabila ada pengajuan dari pihak Bank Kalbar, debitur memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, yang diinginkan adalah kredit segera dicairkan, tidak peduli Perusahaan Penjamin/Asuransi yang digunakan untuk menjamin kredit yang diberikan oleh Bank Kalbar, tidak ada waktu menjelaskan kepada debitur mengenai imbal jasa atau restitusi/refund untuk yang topup dikarenakan pada saat-saat tertentu banyak debitur yang mengajukan kredit, mendesak agar kreditnya cepat dicairkan, masih ada petugas yang kurang peduli untuk menyampaikan informasi kepada debitur mengenai penyampaian informasi tentang imbal jasa, termasuk pengembalian/restitusi/refund yang merupakan hak dari debitur yang melakukan Topup, Bank Kalbar kurang fokus untuk melakukan

proses restitusi/refund premium kepada pihak Lembaga Penjamin/Perusahaan Asuransi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Manajemen Bank Kalbar pada tanggal 19 Maret 2014 telah menyurati seluruh Cabang Bank Kalbar memberikan Petunjuk Teknis Restitusi Premi melalui surat nomor : KRD/KP-ADK/112 khusus kredit-kredit yang penjaminannya melalui Perusahaan PT.Askrida, Pada tanggal 13 Oktober 2014, Direksi Bank Kalbar melakukan addendum perjanjian dengan perusahaan penjamin PT.(Persero) Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dengan menambahkan satu pasal khusus yakni dengan menambahkan pasal antara 8 dan 9 yakni pasal 8a yang mengatur tentang Restitusi/Refund Premium, memperbaharui perjanjian kerjasama dengan PT.(Persero) Asuransi Jasa Indonesia, pada tanggal 17 Juni 2016 menambah pada pasal 9 ayat (7) khusus untuk refund premium/restitusi atas topup kredit, tanggal 22 Desember 2015 Direksi Bank Kalbar menyurati Cabang-cabang bagi debitur-debitur yang melaksanakan topup tanpa harus menutup fasilitas yang lama sehingga tidak perlu melakukan restitusi/refund premium, cukup membuat perjanjian baru dengan tambahan kredit, di setiap Rapat Pemimpin (Rapim) Catur Wulan, seluruh pemimpin Cabang dalam menyalurkan kredit kepada Pegawai Negeri, harus menginformasi mengenai imbal jasa termasuk hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian penjaminan dengan pihak penjamin, memerintahkan seluruh Pemimpin Cabang tetap fokus melakukan sosialisasi mengenai informasi imbal jasa.

Rekomendasi yang diberikan adalah Bank Kalbar dalam rangka memberikan perlindungan Konsumen/debitur hendaknya lebih fokus terutama petugas-petugas kredit pada saat menyalurkan kredit menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban dengan pembayaran imbal jasa, Melaksanakan Kebijakan-Kebijakan yang telah dibuat Pihak Manajemen Bank Kalbar sehubungan dengan imbal jasa terkait restitusi/refund premium kepada lembaga Penjamin/asuransi

**Kata Kunci : Pemberian Kredit, Imbal Jasa Pertanggungan, Asuransi**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Fasilitas kredit akan diberikan jika nasabah menyediakan barang jaminan. Pemberian Kredit juga merupakan masalah yang lazim ditemui dalam suatu usaha yang dikelola oleh orang atau badan hukum atau badan usaha. Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang relatif sulit.

Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun didalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Adanya jaminan dalam hal perjanjian kredit ini sangat diperlukan, karena lembaga keuangan mempunyai suatu kepentingan hukum bahwa nasabah yang menjadi debitur memenuhi kewajiban atas perikatan yang telah dibuatnya.<sup>1</sup>

Pada umumnya jaminan itu merupakan bentuk pengamanan kredit berupa kebendaan. Penanaman dana dalam bentuk kredit pasti akan menghasilkan bunga yang relatif tinggi. Namun dilihat dari resikonya, maka pada penanaman dana dalam bentuk kredit memiliki resiko kemacetan dalam pengambilan kredit. Selain adanya jaminan yang diberikan oleh pihak debitur, untuk kredit pada jumlah tertentu biasanya diperlukan asuransi yang digunakan sebagai jaminan tambahan yang akan digunakan untuk mengatasi resiko yang mungkin dialami oleh kreditur dalam proses pembayaran kreditnya.

Djoko Prakoso mendefinisikan asuransi sebagai pertanggungan dimana dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yang satu sanggup akan menanggung atau menjamin, bahwa pihak yang lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian yang mungkin ia akan menderita sebagai akibat dari suatu peristiwa, yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.<sup>2</sup> Begitu pula A. Hasyim menyatakan bahwa asuransi sebagai suatu persetujuan atau perjanjian untung-untungan, disebabkan ketidak seimbangan

---

<sup>1</sup> Tan Kamello, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang didambakan*, Alumni, Bandung, , hlm.1.

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, 2004, *Asuransi di Indonesia*, Effhar & Dahara Prize, Semarang, hlm.13.

nilai yang diserahkan masing-masing pihak dimana penanggung kemungkinan melaksanakan ganti rugi yang sangat besar dengan menerima pembayaran premi yang kecil dari tertanggung bahkan mungkin tidak membayar ganti rugi sama sekali.<sup>3</sup>

Perjanjian atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik, oleh karena para pihak saling mengikatkan diri, demikian pula penanggung dalam hal mempertimbangkan besarnya suatu resiko atau suatu kewajiban memikul kerugian, diterimanya pula kontra prestasi dalam bentuk premi dari tertanggung yang seimbang dengan resiko itu. Perjanjian ini tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian timbal balik secara murni dimana prestasi secara timbal balik tidak seimbang.<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 *Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:*

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”*

Penting adanya asuransi dalam perjanjian kredit untuk dapat menanggung resiko meninggal yang mungkin terjadi selama proses kredit ini berjalan yang diakibatkan atas resiko meninggal dunia ataupun cacat total, karena jika hal ini tidak dilakukan sebelumnya maka akan berpotensi menyebabkan terjadinya kredit macet. Persoalan kredit macet menjadi persoalan yang sangat serius yang

---

<sup>3</sup> Sri Rejeki Hartono, 1997, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Cet.. III, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 80

<sup>4</sup> Emmy pangibuan, Hukum Pertanggungan, Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran, Jiwa, op.cit. hal.8.

diakibatkan atas kejadian yang terjadi terhadap debitur yang mengakibatkan meninggal dunia sehingga akan terjadi Kredit macet yang dapat menghambat aktifitas bank yang menarik dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau calon debitur tidak dapat menjalankan fungsinya secara baik, manakala kredit yang disalurkan itu kemudian mengalami kemacetan dalam pengambilannya.

Bank memiliki cara agar terhindar dari resiko kerugian akibat pemberian kredit kepada nasabah dengan mempertanggungkan kredit pada perusahaan jasa pertanggungan yang mana premi pertanggungan tersebut dibayar oleh nasabah, dalam perjanjian pertanggungan kredit antara bank dengan perusahaan terjadi pemberian imbal jasa atas pertanggungan tersebut yang tidak pernah diberikan informasinya kepada nasabah, karena Pihak Bank yang langsung berhubungan dengan Pihak Perusahaan Penjamin/Asuransi, padahal premi dibayar oleh pihak nasabah dan bukan pihak bank hanya “**Banker Clause**” sampai kredit tersebut dinyatakan lunas oleh pihak Bank, namun jika terjadi, debitur melunaskan kredit sebelum jangka waktu selesai atau mengambil fasilitas kredit baru dengan melunaskan kredit yang lama dengan pengenaan imbal jasa yang baru sesuai dengan jumlah maksimum kredit yang diberikan, maka imbal jasa yang telah dibayarkan tidak sesuai jangka waktu akan hilang dengan kata lain nasabah debitur sangat dirugikan, seharusnya imbal jasa yang dibayarkan tidak sesuai dengan jangka waktu diperhitungkan dan dikembalikan kedebitur. Debitur sebagai Nasabah seharusnya dilindungi dibidang perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawasan Lembaga sebagai Pengawasan Lembaga Keuangan telah mengeluarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK nomor : 1/POJK.07/2013 1/POJK.07/2013 mengatur tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada penelitian tesis dengan judul :” **KEWAJIBAN BANK KALBAR DALAM PEMBERIAN INFORMASI KEPADA DEBITUR SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN KREDIT TERKAIT IMBAL JASA PERTANGGUNGAN**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hubungan hukum antara Bank Kalbar, debitur dan lembaga pertanggungan sehubungan dengan pemberian kredit ?
2. Bagaimana tanggung jawab Bank Kalbar terhadap kerugian debitur akibat tidak disampaikannya informasi terkait pembayaran imbal jasa pertanggungan?
3. Bagaimanakah seharusnya tindakan yang dilakukan Bank Kalbar terkait pembayaran imbal jasa pertanggungan agar dapat memberikan perlindungan hukum pada debitur ?

## **C. TINJAUAN PUSTAKA**

Informasi mengenai produk merupakan kewajiban setiap pihak yang berhubungan dengan perasuransian, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Perasuransian nomor 40 tahun 2014 pada pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa *Perusahaan Asuransi wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai resiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi.*

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 telah mengatur tentang kewajiban Pelaku Usaha dalam hal ini baik Perbankan maupun Perusahaan Penjaminan/asuransi untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen yakni dari pasal 3 sampai dengan pasal 8.

## **D. PEMBAHASAN MASALAH**

Informasi mengenai Imbal Jasa yang merupakan kewajiban Pihak Bank Kalbar untuk disampaikan kepada debitur/konsumen tidak dilaksanakan dengan baik oleh Bank Kalbar karena imbal jasa terkait dengan perjanjian penjaminan yang pasti merupakan prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak Debitur/konsumen yang menimbulkan hak untuk memperoleh restitusi/refund premium karena penghentian kredit sebelum jangka waktu atau lebih dikenal dengan nama Topup

apabila memperbaharui kembali fasilitas kreditnya, sehingga nasabah debitur/konsumen dirugikan, karena dilapangan tidak dilaksanakan oleh para petugas/kasi kredit.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan tidak sampainya informasi kepada debitur/konsumen terkait dengan imbal jasa antara lain: Sebelum Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh debitur hanya disuruh membaca setiap halaman perjanjian kredit, dalam Perjanjian Kredit antara debitur dengan Bank Kalbar, tidak ada diperjanjikan tentang pengembalian imbal jasa penjaminan/premi asuransi kredit apabila kredit dilunasi lebih cepat atau sebelum jatuh tempo jangka waktu kredit, tidak diinformasikan perusahaan asuransi yang menjadi penjamin serta resiko-resiko yang dicover, Perusahaan Penjamin/Lembaga Penjamin hanya bisa melakukan restitusi/ refund premium imbal hanya diketahui apabila ada pengajuan dari pihak Bank Kalbar, debitur memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, yang diinginkan adalah kredit segera dicairkan, tidak peduli Perusahaan Penjamin/Asuransi yang digunakan untuk menjamin kredit yang diberikan oleh Bank Kalbar, tidak ada waktu menjelaskan kepada debitur mengenai imbal jasa atau restitusi/refund untuk yang topup dikarenakan pada saat-saat tertentu banyak debitur yang mengajukan kredit, mendesak agar kreditnya cepat dicairkan, masih ada petugas yang kurang peduli untuk menyampaikan informasi kepada debitur mengenai penyampaian informasi tentang imbal jasa, termasuk pengembalian/restitusi/refund yang merupakan hak dari debitur yang melakukan Topup, Bank Kalbar kurang fokus untuk melakukan proses restitusi/refund premium kepada pihak Lembaga Penjamin/Perusahaan Asuransi.

## **E. KESIMPULAN**

1. Dalam pemberian Kredit Bank Kalbar timbul dua Perjanjian, Perjanjian Kredit merupakan Perjanjian Utama, merupakan perjanjian Utang Piutang/pinjaman uang dimana Bank Kalbar sebagai kreditur dan pihak peminjam uang yang mendapat fasilitas pinjaman disebut sebagai debitur,

dan Perjanjian tambahan berupa perjanjian Penjaminan, timbul hubungan hukum tiga pihak, Perusahaan Asuransi/Lembaga Penjaminan sebagai Penjamin, Debitur/konsumen sebagai Terjamin dan Pihak Bank Kalbar sebagai Penerima jaminan.

2. Bank Kalbar harus bertanggung jawab terhadap kerugian debitur akibat tidak disampaikannya informasi terkait pembayaran imbal jasa pertanggungan, dengan melaksanakan proses/pengajuan restitusi/refund premium kepada pihak Penjamin, jika debitur melakukan Topup pinjamannya, jika tidak dilakukan maka debitur bisa mengajukan keberatan kepada Bank Kalbar melalui Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen, atau berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Bank Kalbar dengan Debitur, menggugat Lembaga Penjamin dan Bank Kalbar sebagai Pihak Turut Tergugat.
3. Tindakan yang dilakukan oleh Pihak Manajemen Bank Kalbar terkait pembayaran imbal jasa pertanggungan agar dapat memberikan perlindungan hukum pada debitur sudah sangat tepat namun pelaksanaan kurang mendapat perhatian dalam penerapannya.
4. Bank Kalbar belum melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan informasi kepada debitur sehubungan dengan pemberian kredit terkait imbal jasa khususnya restitusi/refund premium kepada pihak lembaga Penjamin, yang mana restitusi yang dilakukan masih sangat minim dibandingkan dengan pembayaran imbal jasa yang dibayarkan pada saat penyaluran kredit.



## DAFTAR BACAAN

### A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

----- . 1995. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Jakarta : Alumni.

----- .2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung.

Angger Sigit Pramukti, SH dan Andre Budiman, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Ahmadi Miru, Prof, Dr, SH,MS, dan Sakka Pati, SH, MH, 2014, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2015, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Aulia Muthiah, S.H.I., M.H. 2016, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustakabarupers, Yoyakarta.

Bahsan, M, SH,SE, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, 2015, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007. *Metodologi Penelitian*. PT.Bumi Aksara. Jakarta.

Daeng Naja HR, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Djoko Prakoso, 2004, *Asuransi Indonesia*, Effhar & Dahara Prize, Semarang

Erman Rajagukguk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung.

Emmy Pangibuan, *Hukum Pertanggungan, pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran, Jiwa* , Press, Jakarta.

- Firman Turmantara Endipradja, Dr.S.H,S.Sos,M.Hum,2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang.
- Gandaprawira. 1992. *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hardijan Rusli,1993. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. PT. Midas Surya Grafindo. Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasanuddin Rahman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Imran Nating, 2004, *Tanggung jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Irawan Soehartono, 1995. *Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan limit Sosial Lainnya)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga. Banyumedia Publishing. Malang.
- Maria S.W.Sumardjono, 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 1980. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung.
- , 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya, Bandung.
- Muhammad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Munir Fuady, 1999. *Hukum Perbankan Modern*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung.

- Munir Fuady. 2003. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Keempat*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pieter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, edisi Pertama Cetakan ketiga, Kencana, Jakarta.
- 2011. *Penelitian Hukum*, edisi Pertama Cetakan Kesebelas, Kencana, Jakarta.
- Purwahid Patrik. 1986. *Asas Itikad Baik dan Kepatuhan Dalam Perjanjian*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Rahmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ricardo Simanjuntak. 2006. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan. Jakarta.
- R. Setiawan. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti, 2002. *Hukum Perjanjian Cetakan XIX*, PT. Intermasa, Jakarta
- RSM.Al Amin. 2012. *Sejarah Singkat UUM*. Pontianak.
- Roni Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Salim HS, 2007. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sentosa Sembiring, SH, MH, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soerjono, Soekanto dan Sri mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet-III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1990. *Aneka Perjanjian*, (cetakan Kesepuluh), PT. Citra Aditya Bakti, bandung

- Subekti, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
- Sutrisno Hadi. 2000. *Metodologi Research*, Yogyakarta.
- Tan Kamello, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang didambakan*, Alumni, Bandung.
- Thomas Suyatno, et.al, 1990. *Dasar-dasar Perkreditan*. Cetakan Ketiga. Gramedia. Jakarta.
- Tim Bank Kalbar, 2016, Bank Kalbar Sejarah “tempo Doelo” Refleksi Maka Kini dan Masa Depan, Top Indonesia, Pontianak.
- Wiryono Prodjodikoro. 1976. *Hukum Antar Golongan di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung.
- Makalah-makalah, Bahan-bahan dari Website di Internet

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Negara RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Negara RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undnag-Undang Negara RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undnag-Undang Negara RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Negara RI Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritasa Jasa keuangan

Undang-Undang Negara RI nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan

Peraturan Otoritas Jasa keuangan nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Kewajiban Bank Memberikan Informasi Kepada Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 222/KMK.10/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK 07/ 2014 tentang Perjanjian Baku

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang ***Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum***